



BELUM ADA PEMKAB YANG AJUKAN Harga Jual Beras Operasi Pasar Direvisi

YOGYA (KR) - Operasi Pasar (OP) nampaknya sampai saat ini belum akan digelar, mengingat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) belum mengajukan permintaan karena kondisi harga sembako dinilai stabil. Harga OP beras juga mengalami revisi dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.400/kg yang kini tengah menunggu payung hukum Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY, Budi Anto mengatakan ada perubahan harga beras untuk OP dari pusat yakni dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.400 perkg. Terdapat selisih Rp 600 perkg maka pihaknya meminta payung hukum baru bisa melakukan OP nantinya jika ada permintaan.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Pemkab/Pemkot di DIY, karena sampai sekarangpun mereka belum meminta untuk OP. Kami tetap menunggu permintaan sekahigus payung hukum revisi harga beras untuk OP tersebut melalui SK Gubernur DIY nantinya," tutur Anton kepada KR, Kamis (2/7).

Anton menyampaikan terkait perbedaan harga beras OP tersebut dari Rp

6.800 ke Rp 7.400/kg, pihaknya tetap mengingatkan kabupaten/kota apakah butuh OP atau tidak. Seandainya Pemkab/Pemkot tidak mengusulkan OP, Disperindagkop dan UKM DIY tidak akan melakukan OP. Artinya harga sembako terkondisi normal di tingkat kabupaten/kota di DIY.

"Kami tunggu mendekati Lebaran, apabila tidak ada permintaan dari kabupaten/kota tidak akan dilakukan OP. Setelah kami kaji, OP sifatnya hanya sebagai antisipasi, kalau tidak ada perubahan harga signifikan ya tidak perlu kita lakukan jadi tidak wajib," tandasnya.

Anton menambahkan, OP tidak hanya digelar pada waktu Lebaran namun juga disiapkan untuk Natal/Tahun Baru dan apabila ada kegagalan

panen. Sehingga OP merupakan upaya antisipasi menjaga kestabilan harga sembako di pasaran yang cenderung naik akibat melonjaknya daya beli masyarakat.

Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan SDA Setda DIY Tri Mulyono mengatakan Disperindagkop dan UKM DIY sudah mengundang kabupaten/kota untuk menggelar OP di beberapa kecamatan. OP ini digelar bagi masyarakat bukan pedagang agar lebih tepat sasaran. "Kita sifatnya mendampingi, teknisnya ada di dinas terkait yang aktif berkomunikasi dengan Pemkot/Pemkab. Prinsipnya untuk mengondisikan stabilitas harga sembako di tingkat pasar memang di perlukan OP dari permintaan kabupaten/kota," katanya.

Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY tersebut menyampaikan OP dapat digelar rutin dan atas permintaan pemerintah kabupaten/kota. Disperindagkop dan UKM DIY hanya bisa menggelar OP reguler apabila ada permintaan. Kondisi harga sembako di pasaran sendiri terpan-tau normal, tidak mengalami gejolak

yang berarti. Sebab saat ini permintaan cenderung normal dan di beberapa daerah digelar OP dengan harapan harga sembako cenderung turun dan stabil.

"Kami juga akan adakan uji pasar lagi H-3 sebelum Lebaran. Dari segi pasokan atau stok dan distribusi sembako tetap dijaga dan dipantau baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Bahkan pengawasan di tingkatkan kepada produk-produk yang di sinyalir kedaluarsa bekerja sama dengan BBPOM DIY," papar Tri.

Pihaknya menilai yang perlu diwaspadai selain kenaikan bumbu-bumbu utamanya cabai dan bawang merah, juga perlu diwaspadai kenaikan harga pada telur ayam ras dan daging baik ayam maupun sapi. Hal ini terkait dengan permintaan konsumen jelang lebaran. Sementara untuk beras, harga relatif normal dan pasokannya aman hingga 3 bulan ke depan, serta raskin telah diturunkan tepat waktu. "Secara umum kondisinya stabil dan terkendali baik dari sisi stok, harga dan distribusi sembako jelang Lebaran," pungkas Tri. (R-4)e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005